



Monopoli Sumber Daya Alam Sebagai Pemicu Konflik Di Afrika Tengah

Tegar Bramantya¹

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

*Email Penulis korespondensi: tegarb@upnvj.ac.id

Abstrak

Afrika tengah sebagai negara penghasil mineral dan minyak yang melimpah. Secara dengan adanya keberlimpahan itu semestinya bisa menjadi negara yang maju melalui pengembangan teknologi ekstraktifnya, akan tetapi negara tersebut malah dilanda peperangan saudara dan korupsi yang tidak kunjung selesai. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan Kembali dan melihat keterkaitan rezim politik dengan adanya kelompok bersenjata di Afrika tengah, dengan melakukan pengumpulan data primer berupa jurnal dan artikel, dan data sekunder berupa berita dan data statistic yang akan dijelaskan secara deskriptif dalam tulisan ini. Dan pada intinya bahwa keterpurukan negara di Afrika Tengah merupakan produk dari system pemerintahannya yang bermasalah baik itu dari aspek pejabat yang korup dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya

Kata kunci: Afrika tengah, kelompok bersenjata, industry ekstraksi

Abstract

Central Africa is a country that produces abundant minerals and oil. With this abundance, it should be able to become a developed country through the development of its extractive technology, but the country is instead beset by civil wars and corruption that will never end. This article aims to explain and see the relationship between political regimes and the existence of armed groups in Central Africa, by collecting primary data in the form of journals and articles, and secondary data in the form of news and statistical data which will be described descriptively in this paper. And in essence that the downturn of the country in Central Africa is a product of its problematic government system, both from the aspect of corrupt officials and various other economic problems.

Keyword: *Central Africa, Extractive industry, Armed Group*

Pendahuluan

Di era yang terus menunjukkan perkembangan modernisasinya, Globalisasi menjadi suatu hal yang lazim menyebar secara massif dan terstruktur ke berbagai belahan dunia. Globalisasi sendiri didefinisikan sebagai proses yang menjadikan suatu (Benda mati atau perilaku masyarakat) sebagai suatu ciri yang mendefinisikan apa itu manusia di dunia ini tanpa adanya Batasan-batasan wilayah. Globalisasi merupakan suatu bentuk atau proses yang kompleks dimana belum ada definisi pasti yang dapat menjelaskan Globalisasi dalam satu pengertian, oleh karena itu definisi globalisasi setiap individu dapat berbeda beda, ada yang melihat globalisasi sebagai suatu proses



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>

P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



social, proses sejarah atau proses alami yang membentuk suatu keterikatan atau keterkaitan satu negara dengan negara lainnya di dunia, sehingga membentuk suatu ekosistem yang baru di tatanan dunia internasional, dengan menghilangkan berbagai batas-batas fisik negara satu dengan negara lainnya, oleh karena itu actor negara mempunyai kekuatan yang dominan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait permasalahan Internasional maupun masalah internal negaranya, negara maju cenderung melakukan investasi terhadap negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti di negara Afrika Tengah yang dimana kaya akan mineral tambangnya seperti berlian, emas, nikel, dan lainnya. Walaupun kaya akan akan mineral tambang RAT (Republik Afrika Tengah) selalu diguncang dengan turbulensi perang dan konflik yang tidak berkesudahan, memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonominya.

RAT (Republik Afrika Tengah) merupakan salah satu Kawasan yang ada di kawasan Afrika terbagi menjadi beberapa wilayah, salah satunya wilayah Afrika Tengah. wilayah ini mencakup Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo, Gabon, Sao Tome dan Principe, Angola, Chad, Guinea Khatulistiwa (unstats.un.org 2013, hal.2). Negara-Negara tersebut mengalami dinamika politik dan keamanan yang tidak stabil salah satunya adalah Republik Afrika Tengah.

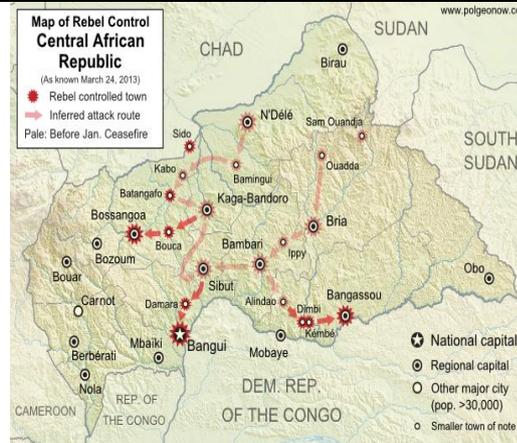
Dengan mencakup lahan seluas sekitar 620.000 kilometer persegi (240.000 sq mi). Pada 2018, diperkirakan memiliki populasi sekitar 4,7 juta. Pada 2021, RAT dipenuhi oleh kejadian konflik terutama perang saudara yang berlangsung sejak 2012 (hrw.org 2019). Republik Afrika Tengah mengalami konflik dan krisis yang berkepanjangan semenjak diberikannya kemerdekaan oleh Prancis, tanpa adanya kondisi yang aman di R.A.T membuat negara ini masuk dalam daftar 10 negara yang gagal dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahannya, dalam konteks ini banyak hal yang mempengaruhi kegagalannya sistem pemerintahan R.A.T antara lain ketidakamanan/insecurity karena konflik yang tidak dapat diredam dan dikontrol oleh kekuatan negaranya seperti dari pihak militernya berujung pada ketidakstabilan kawasannya, lalu keadaan dinamika politik internal negaranya sendiri yang tidak stabil, dimana para pemilik kekuasaan menimbulkan konflik untuk memegang kendali penuh atas negara ini. Dan buruknya pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomis bagi kesejahteraan bersama, penguasaan sumber daya alam yang hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan kelompok, dimana kelompok ini merupakan sebuah organisasi pemberontak yang dimana mereka memperjual belikan sumber daya alam, yang dimana hasil penjualan dipergunakan untuk membiayai aksi pemberontakannya. Kondisi di RAT sendiri pada tahun 2013-2014 tengah dalam krisis dimana konflik bersenjata mengeksploitasi keadaan keamanan yang tidak stabil setelah koalisi pemberontak Seleka (FIDH 2014, p.8-9) dalam bahasa lokal berarti aliansi, mengambil alih pemerintah Pusat pada Maret 2013 (Foreign Relation Committee 2013, p.1).

Konflik kekerasan antara dua pihak di RAT yang dimana melibatkan kelompok Seleka dan Anti Balaka, berawal dari ketidaksukaannya terhadap pemerintah yang baru berujung pada konflik etnis dimana pemegang kekuasaan ini merupakan seorang yang berasal dari kelompok minoritas. Kelompok mayoritas sendiri yang notabenehnya merupakan penganut Kristen hanya sebagai penambang emas dan berlian, mereka merasa bahwa mayoritas lah yang harus menguasai sektor perdagangan, bukannya sebaliknya. Berawal dari ketidakpuasaan atas penguasaan sumber daya ala mini mulai memicu terjadinya konflik etnis di RAT, dan secara tidak langsung terjadi pembersihan etnis di Kawasan ini.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Gambar 1 Peta Kendali Pemberontak Afrika Tengah

Gambar diatas menggambarkan bagaimana penyebaran konflik yang bermula dari bagian utara RAT. Di daerah utara merupakan tempat berfokusnya kekuatan kelompok Seleka, dan merupakan pusat dari pertambangan mineral berupa emas, berlian dan sumber mineral lainnya. Kelompok pemberontak yang muncul di Utara ini bersikeras bahwa mereka ingin mengambil Kembali sumber daya alam yang sudah dikuasai kelompok minoritas, yang dimana mereka menyatakan bahwa semua sumber daya alam dimonopoli dan dipakai tidak sebagaimana mestinya. motivasi mereka untuk menggulingkan rezim Bozize. Setelah berkuasa, Séléka juga menyalahgunakan sumber daya CAR, merebut apa yang mereka bisa sebelum mereka dipaksa untuk menyerahkan kendali pada tahun 2014. Pelanggaran ini, pada tahapannya, menciptakan ketegangan dan memicu siklus saling balas yang tidak kunjung berakhir.

Konflik sendiri, menurut Billon (2001) dicirikan dengan meningkatnya konflik bersenjata pada berbagai wilayah kaya sumberdaya alam. Konflik sering muncul berkaitan dengan perebutan akses dan kontrol atas sumberdaya alam, seperti mineral tambang, sungai, danau, lembah subur (Jones, 1998). Akhir-akhir ini banyak muncul konflik kontemporer atau perang baru seperti resource war, globalized war economy, organized crime, state terrorism maupun radical terrorism yang penuh akan kepentingan global. Porto (2002) terkait dengan transformasi struktural perang yang terjadi karena perubahan radikal berkaitan dengan tujuan konflik sendiri dikemukakan bahwa the profile of wars has changed because 'new wars' are about identity politics in contrast to the geopolitical ideological goals of earlier wars. Ranging from ethnic politics to nationalist movement claiming independence or succession, the vast majority of groups engaged in the contemporary armed conflicts define themselves or the basis of their identity, whether of a national, ethnic, religious or cultural character.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pengelolaan sumber daya alam di Kawasan Afrika melalui pada arah teoritik dan memberikan pemaknaan teoritiknya atas konflik perebutan sumber daya alam yang melimpah sebagai salah satu pemicu konflik antar etnis dan antar daerah kelompok masyarakat di Afrika. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang konflik mineral yang terjadi di daerah Afrika tengah kemudian dilanjutkan terhadap berbagai konflik di daerah lainnya dan hubungan rezim politik yang ada dengan kemunculan kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai beberapa poin-poin vital sumber daya alam.



Kajian Pustaka

Teori Konflik Lingkungan dan Sumber daya alam, pemahaman teoritik dan bagaimana individual memaknai pengertian empiric terhadap perubahan dan transisi msasyarakat sangat berkaitan erat dengan adanya konflik atas sumber daya yang sangat rumit. Dinyatakan oleh (Fink,1968) bahwa betapa panjang dan kompleks sejarah konflik sosial. Pertanyaan ilmiah mengenai hal itu sama tuanya dengan ilmu sosial itu sendiri. Artinya studi-studi mengenai konflik telah lama. In many disciplines and from many viewpoints, great bodies of data have been collected, and countless generalizations, hypotheses and theories have been constructed to account for sosial conflict phenomena (h. 412).s

Teori Ketamakan (The Greedy Theory), Kerakusan dan rasa ingin memiliki segalanya merupakan salah satu dari tujuh dosa besar manusia yang baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat muncul sewaktu-waktu dalam perilakunya terkait hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumber daya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marjinalisasi kepentingan masyarakat lain (Billon, 2001; Porto, 2002). Kita ambil contoh korupsi yang terjadi di wilayah Gabon, Afrika Tengah yang dimana dilaporkan oleh surat kabar setempat telah terjadi hilangnya atau raibnya sekitar 85 miliar franc (mata uang local) atau senilai 129 juta euor dari perusahaan minyak Gabon (GOC) selama dua tahun sebelumnya, bisa dilihat bahwa Gabon sebagai daerah bagian yang kaya akan minyak, akan tetapi kekayaan itu malah disalah gunakan dan 3 orang individu merasa bahwa mereka harus memiliki uang hasil produksi minyak itu. Walaupun kasus ini sudah terungkap tapi tidak menutup kemungkinan akan munculnya kasus kasus seperti ini di masa mendatang. Kepentingan ekonomi individu para pemegang kekuasaan ini hanyalah ingin memperoleh manfaat dari hasil produksi minyak regional, hal ini mengakibatkan daya hidup masyarakat local yang mengalami penurunan signifikan. Kebijakan lingkungan yang diambil kemudian tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan taraf hidup masyarakat local tetap tidak ada perubahan yang berarti.

Keuntungan semua yang diproduksi jelas terus dinikmati oleh para konglomerat dan para penguasa yang mempunyai hubungan dengan produksi sumber daya alam di daerahnya, seperti yang dijelaskan bahwa masyarakat setempat sama sekali tidak dapat menikmati hasil dari produksi sumber daya alam baik itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, keamanan, maupun ketahanan pangan. Hanya kehancuran dan putus asa menanti masyarakat sekitar. Kerakusan eksploitasi sumberdaya alam berlangsung secara bertahap dan hierarkis. Dari bawah hingga keatas sehingga ibarat penyedot debu atas nama pembangunan nasional maka mengalirlah surplus nilai sumber daya itu masuk ke kantong para pejabat.

Memancing di air keruh (Profit Taking), berbagai macam konflik yang muncul dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu di atas penderitaan orang lain, baik para pemegang saham, para pengusaha maupun penghasil hingga broker dan penjual senjata illegal adalah para pengambil keuntungan baik di saat damai maupun disaat perang, maka oleh karena itu konflik dan perang diartikan sebagai dari penyalahgunaan peran dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan manusia bukan sebaliknya untuk menciptakan ketidakamanan.



Teori terakhir ialah Resource curse, Kutukan sumber daya, atau paradoks kelimpahan, mengacu pada paradoks bahwa negara dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan bahan bakar, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan bentuk pembangunan yang lebih buruk daripada negara. - negara kurang berkembang. negara dengan sumber daya alam yang langka. Fenomena ini diduga memiliki beberapa alasan, salah satunya adalah penurunan tingkat persaingan di sektor ekonomi lainnya (akibat apresiasi nilai tukar asli setelah pendapatan sumber daya alam mulai mempengaruhi perekonomian), volatilitas sumber daya alam. pendapatan karena perubahan pasar komoditas global, salah urus sumber daya alam oleh pemerintah atau lembaga. lemah, tidak efektif, tidak stabil, atau korup (mungkin karena aliran pendapatan aktual atau yang diantisipasi dari kegiatan ekstraktif sangat dialihkan).

Metode

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penulis dalam tulisannya menggunakan metode penelitian kualitatif dimana sering disebut metode penelitian naturalistic dikarenakan penelitian dilakukan pada kondisi yang alami, pengamatan yang dilakukan penulis tidak dapat dimanipulasi oleh penulis dan tidak begitu mempengaruhi objek tersebut.

Selain menggunakan metode di atas, penulis juga menggunakan metode deskriptif dimana Menurut Singarimbun (1989:4), “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena tertentu. Menurut Sugiono (2013:4-5), mengenai jenis-jenis metode penelitian diklarifikasikan berdasar tujuan dan tingkat kealamiahannya. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

Strategi penelitian penulis sendiri ialah menggunakan kualitatif untuk pengembangan teori dan deskriptif untuk menjelaskan secara rinci kejadian-kejadian yang ada menjadi studi kasus artikel ini. Menurut Sukmadinata (2009:61-66), strategi penelitian merupakan



satu cara untuk mengumpulkan data yang menjadi objek, subjek, variabel, serta masalah yang diteliti agar data terarah pada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatankegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Sumber data peneliti sendiri mengambil data primer dari berbagai jurnal, artikel, surat kabar, web atau internet, untuk sumber sekundernya sendiri diambil dari beberapa sumber statistic atau penggambaran yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Conflict Mineral

Produsen berlian kasar terkemuka ke-12 di dunia dalam hal nilai, dan berlian mewakili 40% dari total pendapatan ekspor negara tersebut. Pada Maret 2013, koalisi pemberontak Seleka menggulingkan Central Pemerintah Afrika, mengikuti long march selama tiga bulan di ibu kota. Sementara baru-baru ini peristiwa mengikuti sejarah bergejolak ketidakstabilan politik di negara ini, periode sejak 2013 penggulingan ditandai dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Yang menjadi perhatian khusus adalah fakta bahwa berlian timur RAT deposito terletak di pusat konflik yang baru. Komunitas internasional telah menyuarakan kekhawatiran bahwa berlian negara dapat menjadi contoh terbaru dari sumber konflik. Akibatnya, KP menanggukkan RAT pada Mei 2013 karena tidak adanya sistem pengendalian internal yang diperlukan atas berlian sektor setelah pengambil alihan oleh pemberontak Seleka dan kemungkinan bahwa berlian ilegal akan diperjual belikan ke pasar berlian legal (KPCS, 2013).

Bukti adanya investasi yang besar dapat dilihat beberapa lokasi tambang di RAT timur. Struktur seperti bendungan yang baru dibangun yang dibangun di aliran sungai, yang dikenal sebagai "bendungan", terlihat di satelit gambar memungkinkan penambang untuk mengakses deposit berlian yang terletak di dasar sungai dan total invesatsi-investasi skala besar ini mulai dari puluhan ribu dolar hingga lebih dari \$500.000 untuk tenaga kerja, dan operasi. Dengan menganalisis beberapa tangkapan citra satelit, dimungkinkan untuk menentukan bahwa salah satu situs yang dikembangkan ini dibuat selama maraknya aktivitas dan konflik oleh pemberontak seleka itu sendiri di dalam konflik terbaru RAT. Mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang diperlukan untuk membuat dan pembiayaan operasional tambang ini menjadi tanda tanya sendiri dari mana asal pembiayaan yang sangat besar. Kelompok pemberontak yaitu Ex Séléka dan anti-Balaka, telah banyak terlibat dalam perdagangan berlian: mengambil pajak atau biaya perlindungan di daerah yang mereka kuasai dan, dalam beberapa kasus, secara langsung mengendalikan beberapa tambang emas dan berlian ini. Berlian ini ternyata menjadi factor penting bagi pemberontak ini dalam menyediakan sumber pendanaan bagi kelompok yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan mereka dan destabilisasi negara, Pembiayaan dari transaksi



mineral yang dilakukan selain untuk pembelian senjata dan sebagainya, mereka juga menggunakannya untuk pembangunan tempat-tempat tambang baru di daerah yang mereka kuasai.

Meskipun kegiatan pertambangan ini berskala kecil, secara bersamaan kegiatan pertambangan ini dan pendapatan yang mereka hasilkan mewakili ekonomi informal yang besar dan kompleks dengan implikasinya terhadap pendapatan nasional dan regional yang signifikan. Ketidakstabilannya dan kurangnya kontrol negara saat ini atas sektor tambang berskala kecil di RAT memungkinkan mineral diperdagangkan secara illegal dengan relatif sangat mudah karena kurangnya pengawasan dan control terhadap sector pertambangan, dan pemerintah kehilangan banyak pendapatan yang dibutuhkan yang dapat diarahkan ke sosial dan pertumbuhan ekonomi. Banyak otoritas negara dan organisasi pembangunan internasional mulai untuk mengenali potensi ekonomi pertambangan dan berusaha untuk memanfaatkan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan melalui formalisasi sector pertambangan kecil ini.

Hubungan Kekayaan alam dengan Tindakan Terorisme

Menurut (Collier dan Hoeffler,2012) telah mengidentifikasi empat mekanisme utama yang menghubungkan sumber daya alam dengan risiko meningkatnya konflik sipil, dan ini termasuk: sumber daya alam yang melimpah, gerakan separatis, pembiayaan kelompok pemberontak dan isolasi pemerintah dari para masyarakatnya. Menurut tulisan mereka bahwa sumber daya alam merupakan sebuah value yang sangat berharga dan layak diperjuangkan baik itu dengan adanya pertumpahan darah, oleh karena itu dimana ada sumber daya alam yang melimpah ditemukan maka disitulah akan muncul suatu Gerakan separatis yang mencoba untuk menguasai keseluruhan sumber daya yang ada, meskipun mereka akan dimusuhi banyak pihak. Menurut (Fearon,2003) sumber daya alam meningkatkan nilai hadiah dari merebut negara, sehingga meningkatkan potensi keuntungan bagi perburuan rente dan risiko konflik. Contoh praktis dari situasi ini dapat dikutip dari krisis Delta Niger yang berkepanjangan di Nigeria di mana sebagian besar sumber daya minyak mentah dieksploitasi oleh pemerintah pusat tanpa imbalan yang sepadan ke daerah di mana sumber daya tersebut disimpan. Dalam kondisi ini juga akan meningkatkan tekanan bagi beberapa pihak yang terlibat, seperti yang dikatakan (Ross,2004) sumber daya yang dapat dengan mudah diambil dapat membuat konflik bersenjata sangat menguntungkan bagi berbagai pihak yang menguasainya, sehingga pemberontak tidak dapat menemukan jalan yang terbaik untuk mencapai kesepakatan damai. Terlepas dari ini, para kelompok separatism sering mengandalkan uang yang didapat dari produksi sumber daya untuk memperjuangkan ideologinya dengan penuh semangat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kehadirannya sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi suatu bahan bakar untuk terciptanya ketidakamanan di dalam masyarakat, dan yang paling ekstrimnya terciptanya organisasi teroris yang mengancam struktur dan keamanan negara itu sendiri. (Collier dan Hoeffler.1998, 2004) menunjukkan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam menghadapi tantangan yang lebih tinggi kemungkinan perang saudara. (Fearon & Soysa,2002) sama-sama menekankan peran destruktif dari sumber daya minyak untuk perdamaian. Singkatnya, tautan yang kuat memiliki telah ditetapkan antara ketergantungan atau kelimpahan sumber daya alam dan kemungkinan konflik internal.

Exploitasi Sumber Daya Alam Coltan di Congo Afrika Tengah

Penambangan Coltan di Kawasan Afrika Tengah lebih tepatnya pada daerah Kivu sering sekali dilihat sebagai suatu upaya atau konflik untuk menguasai dan mengambil alih bahan-bahan atau mineral mentah yang terdapat pada negara-negara dengan tingkat kerapuhan yang tinggi



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



karena beberapa factor seperti perang, keadaan ekonomi, pemberontakan dan sebagainya. Walaupun dengan adanya penambangan seperti ini dapat dilihat bahwa ada beberapa perkembangan kecil di beberapa sector, akan tetapi tetap menjadi negara yang miskin jika dibandingkan dengan seluruh dunia (UNDP, 2011). Kelompok pemberontak dan kelompok lainnya terus menerus melakukan peperangan untuk memperebutkan akses terhadap barang tambang dan mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan illegal barang tambang tersebut. negara masih dikatakan gagal dalam membentuk suatu ketertiban sosial yang mencukupi sehingga mengakibatkan angka kriminalitas yang tidak terkendali. Akses yang mudah terhadap barang tambang coltan dan mineral lainnya, ditambah dengan hak millik dan pengawasan yang lemah oleh negara, belum lagi institusi dasar negara yang lemah dan sejarah panjang perang saudara, dan permintaan yang tinggi di dunia pasar dapat diasumsikan sebagai penentu utama ketidakamanan dan konflik (Nest, 2011:77.).

Penambangan Coltan dipengaruhi oleh kondisi geologi tertentu endapan terlalu kecil untuk menerima pertambangan industri skala besar pertambangan Coltan di DRC timur terutama dilakukan sebagai pertambangan yang dijalankan oleh masyarakat sekitar dan berskala kecil (ASM, Garrett et al. (2010a, 2010b). Pertambangan yang dijalankan oleh masyarakat ini bisa berbeda-beda mineral yang ditambangnya, dan sistem pada setiap sector pertambangan juga berbeda-beda dikarenakan adanya struktur dan ekonomi masyarakat yang dinamis secara penyebarannya, membuat pembentukan pertambangan yang dikelola oleh masyarakat ini bisa terbentuk dengan mudah, seringnya pergantian pemegang kekuasaan di daerah dan rezim pemerintahan sangat mempengaruhi terbentuknya dan kebijakan pertambangan di daerah masing-masing. Pekerjaan ini didominasi oleh penduduk lokal yang berketerampilan rendah. Perkiraan jumlah penduduk lokal yang menjalani pekerjaan ini bervariasi pada jumlah penambang antara 500.000 dan 2 juta di Afrika Tengah. Dengan rata-rata para pekerja mempunyai empat hingga lima tanggungan untuk setiap penggali, jumlah total orang yang mata pencahariannya tergantung pada aktivitas ini bisa mencapai 8–10 juta atau hingga 16% dari total populasi di Afrika Tengah (World Bank, 2008; Nest, 2011: 17). Pendapatan yang para pekerja tambang ini hasilkan setiap harinya hanya 1\$-5\$ saja, dan mereka juga terjerat berbagai hutang kepada orang yang mempunyai uang ataupun kekuasaan. Para penambang berskala kecil ini sama sekali tidak dilindungi haknya dibawah Undang-Undang pertambangan yang berlaku, karena mereka tidak diwajibkan untuk membayar pajak atau harus mempunyai lisensi penambang mereka diwajibkan untuk membayar lisensi penambangan yang dibayar setiap bulanya sebesar 25\$ dari pejabat setempat. Kebanyakan penambang tidak dapat menyanggupi untuk membayar biaya sebesar itu, dan pemerintah juga tidak dapat melakukan Tindakan koersif untuk memaksa mereka membaya dikarenakan ketidakstabilan internal negara. Walaupun dikatakan sebagai mata pencaharian yang tidak dapat memenuhi sama sekali kebutuhan, pertambangan masih menjadi satu satunya mata pencaharian mereka. Terbatasnya pilihan mata pencaharian itu sendiri, walaupun begitu menurut , Garrett and Lintzer (2010: 401) menandakan pertambangan skala kecil ini sebagai sebuah jarring yang menahan atau menjadi pillar ekonomi masyarakat walaupun dalam keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali.

DRC baru-baru ini (Juni 2011) mengadopsi undang-undang lingkungan pertamanya termasuk, antara lain, studi dampak lingkungan untuk kegiatan pertambangan (Republique Democratique du Congo, 2011). Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi dalam



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



penambangan Coltan di DRC biasanya dapat menaati dan mempunyai kesadaran untuk mengikuti standarisasi internasional terkait industri ekstraksi sumber daya alam mineral, kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat sendiri tidak mengikuti standarisasi yang ada, yang dasarnya saja tidak dipatuhi oleh para penambang berskala kecil ini. Seperti yang diindikasikan oleh studi lingkungan di sector pertambangan di DRC, efek pencemaran dari kegiatan pertambangan berskala kecil ini termasuk kemungkinan kondisi tambang yang semakin tidak aman dan pembuangan limbah yang tidak aman, pencemaran air yang disebabkan oleh drainase asam tambang, penutupan lubang dan tambang yang tidak tepat, pembuangan limbah beracun ke dalam air, limbah pertambangan, dll. Perubahan lanskap seperti pembukaan hutan dan penebangan kayu dan kayu bakar adalah hal yang serius dan seringkali tidak dapat diubah, dengan efek sekunder pada pertanian lokal, perikanan dan kehutanann yang berakhir menghancurkan jika petani skala kecil mempekerjakan dirinya sendiri sebagai penggali (Nest, 2011: 49).

Selain konsekuensi lingkungan yang secara langsung dan tidak langsung yang diciptakan oleh pertambangan ini, kehadiran kelompok bersenjata dan kontrol mereka terhadap beberapa daerah dapat memperberat kerusakan habitat alami yang ada. Karena pada faktanya kelompok bersenjata ini tidak mempunyai norma atau kesadaran akan lingkungan, mereka akan terus mengambil atau mengeruk barang tambang tanpa peduli dengan konsekuensinya terhadap lingkungan atas apa yang mereka lakukan, dikarenakan semua pembiayaan operasional kelompok bersenjata ini didanai dari adanya kegiatan ekstraksi barang tambang berupa emas, tungsten, cassiterite dan beberapa eksploitasi sumber alam lainnya seperti pembabatan hutan, illegal fishing, dan perdagangan hewan dilindungi. Semua kegiatan itu dilakukan secara illegal. Berdasarkan fakta yang diungkap bahwa para kelompok pemberontak ini meraup keuntungan dari barang tambang dan pertukaran barang tambang. Dari 13 tempat tambang yang besar 12 diantaranya dikuasai oleh para kelompok pemberontak ini (Nathan and Sakar, 2010: 22). Lemahnya badan institusi DRC dan kurangnya efektivitas dalam mengelola negaranya dan kurangnya pendanaan terhadap tentara nasionalnya, merupakan factor-faktor yang memperkuat proliferasinya kelompok militer yang independent dari negara, yang dimana kelompok ini mengisi kekosongan yang seharusnya diisi oleh pemerintah. Tambang-tambang berskala kecil biasaya dikendalikan oleh kelompok bersenjata local atau militia, secara kelompok disebut Mai Mai. Kedua kelompok ini yaitu kelompok bersenjata yang besar dan kelompok Mai Mai menetapkan pajak pada tambang tambang yang beroperasi dan melakukan Tindakan pemerasan di berbagai checkpoint yang mereka kuasai. Khususnya dua kelompok, Congres National pour la Defense du Peuple (CNDP), sebuah gerakan politik dengan sayap militer yang disebut Tentara Nasional Kongo (CNA), dan Forces De´mocratiques de Libe´ration du Rwanda (FDLR) telah diselidiki oleh para ahli. PBB. Kehadiran CNDP terbatas pada beberapa tambang coltan. Tambang Coltan Bibatama mis yang dimiliki oleh seorang senator nasional yang tampaknya menerima kehadiran CNDP dan membayar harga \$0,20/kg yang diekspor setiap melewati pos pemeriksaan. FDLR, sebaliknya, telah hadir di dua Kivus setidaknya selama 14 tahun. Kelompok tersebut dapat mengandalkan jaringan bisnis yang kuat.

Panel PBB memperkirakan bahwa FDLR meraup keuntungan jutaan dolar setiap tahun dari perdagangan mineral di DRC timur. Untuk hubungan ini mereka digambarkan sebagai "les grands" commercants " dan mereka sering melibatkan warga sipil Kongo yang dipaksa untuk bertindak atau berdagang atas nama mereka. Secara lebih umum, tipologi keterlibatan kelompok bersenjata



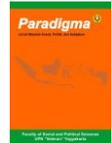
dalam mineral perdagangan dapat bervariasi, termasuk perpajakan, pembayaran biaya perlindungan, keterlibatan komersial dalam kegiatan pertambangan dan penjarahan. Hal seperti patut dicatat bahwa kelompok-kelompok ini juga mendapat untung dari mineral lain seperti emas dan kasiterit.

Laporan PBB (S/2010/596) menetapkan bukti tentang keterlibatan tentara nasional Kongo. Tentara Kongo bersaing di antara mereka sendiri untuk menguasai daerah yang kaya mineral; mereka berkolusi dengan kelompok bersenjata untuk menyerang komandan saingan, dan mereka telah menguasai wilayah yang luas dan kaya sumber daya alam di provinsi Kivu Utara dan Selatan. Di wilayah Walikale, bagian dari Kivu Utara yang kaya akan kasiterit (bijih timah), kontrol perdagangan mineral diberikan kepada CNDP untuk mendorongnya supaya dapat berintegrasi ke dalam tentara Kongo, sebagaimana disepakati dalam kesepakatan damai awal 2009. Meskipun tentara nasional di DRC dibayar, bayarnya rendah, jadi tantangannya adalah jumlah pembayaran dan insentif untuk sumber pendapatan tambahan. Meningkatnya keterlibatan kelompok bersenjata dalam perdagangan mineral dan sulitnya menyingkirkannya telah digunakan sebagai justifikasi oleh Pemerintah DRC untuk pembekuan sementara kegiatan pertambangan di provinsi Selatan dan Selatan. Kivu Utara dan Maniema pada 11 September 2010 (PBB 2010). Konsekuensi dari tindakan ini pada produksi masih belum diketahui. PBB mengklaim aktivitas penambangan masih berlangsung hingga malam hari. Tentu bahwa mereka yang paling terkena dampak adalah orang-orang yang bergantung pada kegiatan ini untuk mata pencaharian mereka.

Pelaku utama penambangan coltan di DRC adalah seperti gambar di atas. Dengan demikian, tidak hanya konflik atas kegiatan pertambangan. Sewa sumber daya dapat diperoleh melalui sejumlah tahap transportasi berikutnya dan perantara di pasar lokal di wilayah tersebut. Jumlah aktor yang terlibat (lihat fig 2) dan fakta bahwa perwakilan resmi dan kelompok bersenjata sering bekerja sama membuat situasi menjadi tidak transparan. Bahkan aktor-aktor yang berpikiran sama pun sulit mendapatkan bukti apakah izin atau sertifikat itu benar secara hukum dan sesuai dengan undang-undang dasar. Akibatnya, banyak aktor mendapat manfaat dari situasi saat ini, dan ada hampir tidak ada insentif untuk mengubah ini dari dalam, karena situasi internal negara yang tidak stabil menjadi factor utama permasalahan ini.

Penutup

Konflik yang terjadi di Central Afrika merupakan sebuah konflik yang tidak mudah untuk diselesaikan oleh negara itu sendiri karena didalam negaranya sendiri struktur internalnya yang rusak dan diporakporanda oleh perang saudara yang tidak kunjung usai, pihak pemegang kekuasaanya yang terus dipenuhi oleh orang-orang korupsi, dan diindikasikan adanya keterlibatan mereka dalam kegiatan pendanaan terorisme juga menjadi hal yang utama dalam pembahasan mengenai konflik yang terus menerus terjadi di Kawasan Afrika pusat ini, oleh karena itu dibutuhkan kekuatan komunitas internasional untuk ikut turut andil dalam menyelesaikan konflik dengan menghentikan atau melakukan pengambil alihan Kembali tempat-tempat penghasil sumber daya alam supaya para kelompok separatism ini akan kehilangan sumber pendanaannya, dan sambil melakukan promosi Kerjasama ekonomi jangka Panjang. Penulis perlu menjelaskan keterbatasan penelitian atau tulisan pada bagian ini. Penulis memberikan saran bagi penelitian atau



kajian yang akan datang atau mengkaji hal-hal lain yang diperlukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Szeftel, M (2000), 'Between Governance and Underdevelopment: Accumulation and Africa's "Catastrophic Corruption"', *Review of African Political Economy*.
- United Nations Security Council UNSC (2001), *Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo*, S/ 2001/357, New York: United Nations.
- Collier, P., Venables, A.J., 2010. *International Rules for Trade in Natural Resources*. WTO Staff Working Paper ERSD-2010-06.
- Garrett, N., Lintzer, M., 2010. Can Katanga's mining sector drive growth and development in the DRC? *Journal of Eastern African Studies* 4 (3), 400–424.
- Haufler, V., 2010. The Kimberley process certification scheme: an innovation in global governance and conflict prevention. *Journal of Business Ethics* 89, 403–416
- OECD, 2010. *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, Paris.
- United Nations Security Council, 2010. *Report S/2010/596, Final report of the Group of Experts on the DRC*, 29 November 2010.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2008. *Economic Development in Africa. Export Performance Following Trade Liberalization: Some Patterns and Policy Perspectives*. Geneva.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2010. *Economic Development in Africa. Report 2010. South-South Cooperation: Africa and the New Forms of Development Partnership*. Geneva.
- United Nations Security Council, 2008. *Report S/2008/773, Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo*, 12 December 2008. USGS, 2011a.
- United Nations States Geological Survey, different years. *Minerals Information Niobium (Columbium) and Tantalum Statistics and Information*.
[/http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/niobium/S](http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/niobium/S) [November 5, 2021].
- Ross, M.L., 2003, Oil, drugs, and diamonds—The varying roles of natural resources in civil war in Ballentine, K., and Sherman, J., eds., *The political economy of armed conflict—Beyond greed and grievance*: Boulder, Lynne Rienner Publishers, h. 47-40.
- ICGLR Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources (RINR)
- Yeboah, Stephen, 2010. "Ghana: Why 'Militarization' in the Mining Sector Must Stop, vol. 25.



**Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik,
dan Kebijakan**

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



-
- Wilson, M.C., Piazza, J.A., 2013. Autocracies and terrorism: conditioning effects of authoritarian regime type on terrorist attacks. *Am. J. Polit. Sci.* 57 (4), 941–955.
- Wick, K., Bulte, E.H., 2006. Contesting resources—rent seeking, conflict and the natural resource curse. *Publ. Choice* 128 (3–4), 457–476.
- Vreeland, J.R., 2008. The effect of political regime on civil war: unpacking anocracy. *J. Conflict Resolut.* 52 (3), 401–425.
- Ross, M.H., 1993. *The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*. Yale University Press.
- Ross, M.L., 2004a. What do we know about natural resources and civil war? *J. Peace Res.* 41 (3), 337–356.
- Ross, M.L., 2004b. What do we know about natural resources and civil war? *J. Peace Res.* 41 (3), 337–356.
- Frynas, J. G., & Buur, L. 2020. The presource curse in Africa: Economic and political effects of anticipating natural resource revenues. *The Extractive Industries and Society*.
- Adedoyin Babajide, Ahmad Hassan Ahmad, Simeon Coleman. 2021. Violent Conflicts and State Capacity: Evidence from Sub-Saharan Africa, *Journal of Government and Economics*,
- Ajide, K. B., Adenuga, J. I., & Raheem, I. D. (2020). Natural resource rents, political regimes and terrorism in Africa. *International Economics*